

DAMPAK PEMINDAHAN PERKANTORAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU KE KECAMATAN TENAYAN RAYA TERHADAP PERKEMBANGAN KOTA PEKANBARU

(THE IMPACT OF PEKANBARU CITY GOVERNMENT OFFICE RELOCATION TO TENAYAN RAYA SUB-DISTRICT TOWARD PEKANBARU CITY DEVELOPMENT)

Rieskie Ayu Zamora*, Bakti Setiawan**

*Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No. 2, Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: rieskie.ayu.zamora@mail.ugm.ac.id

**Dosen Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No. 2, Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Diterima: 2 Agustus 2022 ; Direvisi: 23 Agustus 2022; Disetujui: 30 November 2022

ABSTRAK

Pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan diarahkan ke bagian timur Kota Pekanbaru yaitu dari Kecamatan Sukajadi ke Kecamatan Tenayan Raya yang berjarak \pm 15 km. Proses pemindahan ini berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya, dan mengidentifikasi dampak pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian secara induktif kualitatif. Adapun sumber informasi diperoleh melalui proses wawancara mendalam atau *indepth interview* dengan empat orang informan dari instansi yang berbeda, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Tata Pemerintahan, dan Walikota Pekanbaru. Teknik analisis data yang diperoleh dari informan tersebut adalah analisis deskriptif yang diawali dengan menentukan unit-unit informasi yang membentuk tema-tema, konsep-konsep, dan teorisasi. Hasil dari penelitian ini antara lain adalah pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya sebagai perluasan/pengembangan perkantoran pemerintahan yang lama telah berhasil dilakukan. Pemindahan perkantoran pemerintahan ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Proses yang dilakukan bermula dari adanya visi dan misi kepala daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, inventarisasi dokumen perencanaan, penentuan alokasi pendanaan pembangunan perkantoran, menjalin komunikasi dengan *stakeholder* yang terlibat, menentukan lokasi yang tepat, dimensi waktu, menyediakan sarana dan prasarana, serta mengalihfungsikan gedung perkantoran yang lama. Dampaknya terhadap akselerasi perkembangan Kota Pekanbaru adalah terbentuknya kota baru dengan nama Bandar Raya Tenayan.

Kata kunci: Pemindahan perkantoran pemerintahan; Kota baru; Kota Pekanbaru

ABSTRACT

The government office relocation was directed to the Tenayan Raya Sub-district as the eastern side of Pekanbaru City, which has distance 15 kilometres away from Sukajadi Sub-district as the old location of the government office. The relocation process has been going on since 2014 until now. The goals of this research are to evaluate the policy of Pekanbaru government office relocation to Tenayan Raya Sub-district and to identify the impact of the government office relocation toward Pekanbaru City development. This research was conducted by applying a qualitative inductive

approach. There are four informants who give the information about government office relocation such as public works and spatial planning agency, development planning agency, governance division, and the mayor of Pekanbaru City by doing indepth-interview. The analytical technique used is descriptive analysis starting from information determination to form themes, concepts, and become a theorization in the end. The result of this research is the government office relocation to Tenayan Raya was successfully implemented as a result government office expansion. The regional head's vision and mission on 2012-2017 become the reason of the relocation process, then followed by planning documents inventory, allocation determination, communication with stakeholders, determining the location, time dimension, providing facilities and infrastructures, and utilize the old government office to be public services mall. The other result is the government office relocation impact toward Pekanbaru city development is the formation of a new city called Bandar Raya Tenayan.

Keywords: Government office relocation; New City; Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar, terarah, dan terukur yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu (Ramdhani dan Muhammad, 2017). Demi mendorong terwujudnya sebuah kebijakan, maka diperlukan proses implementasi kebijakan. Implementasi menurut Setiawan (2004) yaitu sebuah bentuk perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya yang juga membutuhkan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. Sejalan dengan adanya implementasi kebijakan, tentunya akan melahirkan pula suatu proses penilaian atau evaluasi. Dunn (2003) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan publik adalah adanya kebijakan pemindahan ibukota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang banyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai macam pertimbangan telah diadopsi pemerintah seraya melakukan pemindahan IKN tersebut. Rukmana (2010) mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan utama yang memicu pemindahan ibukota antara lain yaitu pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Sejalan dengan kebijakan tersebut, acuan pemindahan ibukota dapat diselaraskan dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada pasal 12 ayat 3 dinyatakan bahwa penetapan lokasi ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Sujarto (1993) menyatakan bahwa konsepsi dasar mengenai kota baru telah berkembang menjadi sebuah pemikiran konseptual untuk memecahkan masalah kepadatan baik di perumahan maupun permukiman kota. Disisi lain, Branch dalam (Febrianty, 2015) mengemukakan bahwa perkembangan kota dan struktur kota di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perkembangan kota terdiri dari kondisi geografis, topografi, fungsi kota, sejarah dan kebudayaan, dan unsur-unsur umum lainnya berupa jalan, penyediaan air bersih, dan jaringan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal dari perkembangan kota adalah hubungan suatu kota dengan kota atau daerah lain secara makro. Sementara itu, Golany dalam (Diningrat, 2014) menyatakan bahwa pengembangan kota baru pada prinsipnya bertujuan untuk meringankan beban kota induk melalui desentralisasi penduduk, distribusi peluang usaha, dan juga penyediaan infrastruktur bermukim.

Melihat adanya kebijakan pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai wadah untuk aktivitas pemerintahan Republik Indonesia serta sebagai inisiasi pembentukan kota baru dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, Kota Pekanbaru juga telah melakukan pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan dari pusat kota ke Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki jarak ± 15 km. Inisiasi pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru tersebut serta proses pembangunannya telah dimulai sekitar tahun 2014 atau sekitar delapan tahun yang lalu. Pada awal tahun 2019, sudah terdapat beberapa instansi yang bersifat non pelayanan yang sudah menempati kompleks perkantoran tersebut.

Alasan utama pemindahan lokasi perkantoran pemerintah diperkuat oleh kondisi perkantoran yang lama sudah tidak representatif lagi baik secara kapasitas maupun aksesibilitas. Pemilihan lokasi ditetapkan pada Kecamatan Tenayan Raya yang berdasarkan RTRW Pekanbaru Tahun 2014-2034 daerah Tenayan merupakan daerah wilayah pembangunan IV yang dikembangkan untuk kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran dan pemerintahan kota, kawasan pariwisata, dan kawasan pertanian (Kumala, 2018). Berdasarkan aturan tersebut tentunya lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru yang baru sudah sesuai dengan RTRW Kota Pekanbaru. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak ahli perencana dan lingkungan yang melakukan protes terhadap keberadaan kompleks perkantoran pemerintah tersebut dengan alasan adanya ketidaksesuaian peruntukkan lahan dan penganggaran biaya tidak termasuk ke dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 yang berlaku pada saat itu, dan RTRW Pekanbaru baru resmi disahkan pada Desember 2020. Disisi lain, terlepas dari aspek hukum yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan masih belum mendapatkan titik terang, pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya yang kondisi eksisting lahannya masih banyak yang belum terbangun memiliki indikasi untuk memicu terjadinya perkembangan Kota Pekanbaru menjadi sebuah kota baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya dan dampaknya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian secara induktif kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Rahmat, 2009) penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif seperti ucapan maupun tulisan serta perilaku orang-orang yang sedang diamati.

Menurut Sugiono (2011) jika dilihat dari segi cara pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui informasi yang tersedia pada instansi pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dan Biro Tata Pemerintahan Kota Pekanbaru. Disisi lain, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam proses pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru seperti informan yang berasal dari Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Biro Tata Pemerintahan Kota Pekanbaru, dan Walikota Pekanbaru. Selain itu dilakukan pula observasi pada kompleks perkantoran pemerintahan di Kota Pekanbaru secara langsung.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan temuan tentang pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya dan dampaknya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru. Analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan yaitu dimulai dengan membuat transkrip wawancara ke dalam bentuk tulisan, menyusun transkrip wawancara secara terstruktur, melakukan

penyederhanaan data melalui kategori-kategori sesuai dengan unit informasi yang sama sehingga menghasilkan tema-tema, mereduksi tema-tema menjadi konsep, dan menarik kesimpulan dari konsep yang telah didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini antara lain adalah terdapat 4 (empat) tema yang terdiri dari berbagai unit informasi yang telah diperoleh pada saat wawancara dengan informan. Empat tema tersebut yaitu faktor internal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, faktor internal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, proses pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, dan dampak pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Unit Informasi dan Tema Faktor Internal Pemindahan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru

Unit Informasi	Tema
Adanya nomenklatur penamaan Keterbatasan lahan dan ruang kerja di lokasi perkantoran pemerintahan yang lama	Faktor Internal Pemindahan Lokasi Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru
Keberadaan posisi Tenayan Raya yang strategis	
Kondisi eksisting Tenayan Raya yang luas	
Belum optimalnya pengembangan wilayah di Kota Pekanbaru	
Inisiasi magnet pertumbuhan untuk pemerataan pembangunan	
Inisiasi pembangunan blok dan super blok	

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

Tema faktor internal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru diperoleh melalui 7 (tujuh) unit informasi yang terdapat pada Tabel 1. Pemindahan perkantoran pemerintahan pada nomenklaturinya adalah upaya untuk melakukan perluasan fisik bangunan perkantoran ataupun pengembangan perkantoran pemerintahan yang lama. Adanya keterbatasan lahan dan juga ruang kerja bagi PNS maupun Non PNS di perkantoran pemerintahan yang lama menjadi pemicu terjadinya pemindahan perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya. Tenayan Raya dipilih sebagai lokasi baru perkantoran pemerintahan karena Tenayan Raya memiliki posisi yang strategis dan melayani aksesibilitas dari wilayah lain di luar Kota Pekanbaru. Selain itu, Tenayan Raya juga memiliki cakupan wilayah yang luas yaitu sebesar 114,40 km² dan sebagai kecamatan terbesar kedua di Kota Pekanbaru setelah Kecamatan Rumbai Timur. Sementara itu, meskipun Kota Pekanbaru tergolong cukup luas, namun pengembangan wilayah masih belum dilakukan secara optimal. Sejak dahulu, pengembangan wilayah di Kota Pekanbaru cenderung lebih sering terjadi di pusat atau tengah kota yang dijadikan sebagai tempat berdirinya perkantoran, sarana perekonomian, sarana pendidikan dan sarana lainnya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah maka diperlukan upaya untuk membentuk magnet pertumbuhan. Pemberian magnet pertumbuhan diwujudkan dalam pembangunan pusat-pusat kegiatan baru pada wilayah yang

belum tumbuh seperti Kecamatan Tenayan Raya dengan membuat pusat pemerintahan dan juga Kawasan Industri Tenayan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah adalah melakukan pembangunan dengan konsep blok dan super blok guna menghindar adanya pembangunan secara linier yang sering terjadi di pusat kota dan bersifat kurang menguntungkan.

Tema faktor eksternal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru diperoleh melalui 2 (dua) unit informasi yang terdapat pada Tabel 2. Menurut Branch dalam (Febrianty, 2015), faktor eksternal perkembangan kota adalah hubungan suatu kota dengan kota atau daerah lain secara makro. Kota Pekanbaru melakukan dan menjalin kerja sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada disekitarnya yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Perkembangan yang terjadi menunjukkan kecenderungan terbentuknya kawasan perkotaan baru yaitu Kota Pekanbaru sebagai kawasan inti dikelilingi oleh kota-kota satelit yang mulai melebur secara alami menjadi sebuah kawasan perkotaan yang lebih besar yang disebut kawasan metropolitan Pekansikawan. Selain adanya kerjasama antar daerah, keberadaan Kawasan Industri Tenayan yang berdekatan dan terletak 1 (satu) kecamatan dengan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru yang baru menjadi pendorong adanya pemindahan perkantoran pemerintahan tersebut ke Kecamatan Tenayan Raya yang diharapkan dapat memicu perkembangan wilayah.

Tabel 2. Unit Informasi dan Tema Faktor Eksternal Pemindahan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru

Unit Informasi	Tema
Kerjasama antar wilayah (Pekansikawan)	Faktor Eksternal Pemindahan Lokasi Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru
Asosiasi dengan Kawasan Industri Tenayan (KIT)	

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

Tema proses pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru diperoleh melalui 8 (delapan) unit informasi yang terdapat pada Tabel 3. Proses pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya bermula oleh adanya gagasan visi dan misi walikota beserta wakil walikota pada saat Pilkada hingga terpilih menjadi kepala daerah tahun 2012-2017. Visi walikota saat itu adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani” dengan salah satu misi yang berkaitan dengan pemindahan perkantoran pemerintah yaitu meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata, serta daerah pinggiran kota. Kebijakan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya juga tertuang dalam RPJM Kota Pekanbaru tahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 dan juga disesuaikan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Riau. Aspek pendanaan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru yang dilakukan secara bertahap. Proses pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru juga mengalami proses komunikasi dengan berbagai *stakeholder*. Komunikasi dilakukan dengan melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dengan masyarakat dan juga berdiskusi dengan Bappeda, PUPR, dan instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan perencanaan umum.

Pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya tentunya mengalami proses yang panjang. Proses yang panjang ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan sebuah pembangunan yang komprehensif mulai dari awal

pembangunan hingga beberapa tahun kedepannya. Proses pemindahan perkantoran pemerintahan juga tidak terlepas dari proses memilih lokasi. Terdapat 2 (dua) pilihan lokasi untuk lokasi perkantoran pemerintahan yaitu Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, namun Tenayan Raya akhirnya dipilih sebagai lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru karena sangat berpotensi untuk dikembangkan dan untuk tumbuh menjadi kota baru. Setelah adanya pemilihan lokasi di Tenayan Raya sebagai lokasi baru perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, maka diperlukan juga adanya ketersediaan sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, infrastruktur berupa jalan sebagai aksesibilitas dari dan ke perkantoran, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sementara itu, pemindahan perkantoran pemerintahan ke Kecamatan Tenayan Raya memicu adanya pengalihan fungsi perkantoran lama di Jalan Sudirman Kecamatan Sukajadi. Fungsi gedung perkantoran lama adalah sebagai pelayanan publik dibidang perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil yang diberi nama Mall Pelayanan Publik (MPP), namun walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah (sekda) tetap dapat bekerja di sana.

Tabel 3. Unit Informasi dan Tema Proses Pemindahan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru

Unit Informasi	Tema
Visi Misi Kepala Daerah Kota Pekanbaru	
Inventarisasi pedoman/dokumen perencanaan	
Pendanaan pembangunan perkantoran	
Adanya komunikasi dengan stakeholder yang terlibat	Proses Pemindahan Lokasi Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru
Adanya dimensi waktu	
Pemilihan lokasi	
Tersedianya sarana dan prasarana	
Pengalihan fungsi perkantoran lama	

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

Tema dampak pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru diperoleh melalui 8 (delapan) unit informasi yang terdapat pada Tabel 4. Pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya memiliki dampak terutama pada aspek lahan. Penggunaan lahan di perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru yang ada di Kecamatan Tenayan Raya pada mulanya ada perkebunan sawit yang kemudian pada tahun 2014 dibeli pemerintah seharga Rp.27.000,- per m². Tahun 2015-2016 harga lahan mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp.136.000,- per m², kemudian pada tahun 2021 harga lahan kembali naik menjadi sebesar Rp.350.000,- sampai dengan Rp.500.000,- per m². Selain adanya kenaikan harga lahan, muncul pula preferensi kepemilikan lahan yang bergantung pada subjek yang berkaitan dengan kepemilikan lahan seperti spekulasi tanah yang cenderung berpikir lama dan melihat situasi dalam mengolah lahan dan investor yang cenderung akan melakukan pembangunan pada lahan yang dibeli. Dampak lain yang timbul karena adanya pemindahan perkantoran tersebut adalah terbangunnya infrastruktur dan kawasan-kawasan baru seperti kawasan wisata dan pusat perdagangan yang mampu menunjang

pertumbuhan kota Pekanbaru. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan yang mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat. perubahan yang terjadi yaitu masyarakat yang awalnya bekerja memproduksi batu bata dari usaha batu bata milik orang lain, namun saat ini sudah dapat membuka usaha berupa kedai atau tempat makan. Tidak hanya itu, dampak lain yang muncul dari keberadaan perkantoran pemerintahan tersebut yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru masyarakat terutama pada Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang lokasinya berdekatan dengan perkantoran pemerintahan. Keberadaan perkantoran pemerintahan di Tenayan Raya juga dapat mengubah cara pandang masyarakat ketika terhadap Tenayan Raya. Tenayan Raya yang dulunya identik dengan hal-hal tidak modern seperti pabrik batu bata, kebun ubi dan tempat pembuangan sampah, namun saat ini sudah berubah menjadi Bandar Raya Tenayan dengan reputasi lebih baik sebagai pusat pemerintahan dan pusat wisata. Disisi lain, lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru yang berada di Kecamatan Tenayan Raya menimbulkan risiko bagi PNS ataupun tenaga honorer yang bekerja di gedung perkantoran Tenayan Raya yaitu mobilitas harian semakin jauh dari lokasi rumah. Selain itu, kondisi akses jalan dulunya tidak sekeras sekarang dan juga kondisi jalan yang dilakukan pengaspalan hanya disesuaikan dengan kebutuhan pengendara jalan untuk mencapai lokasi perkantoran.



Gambar 1. Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya
Sumber: Dokumentasi Penelitian Penulis (2022)

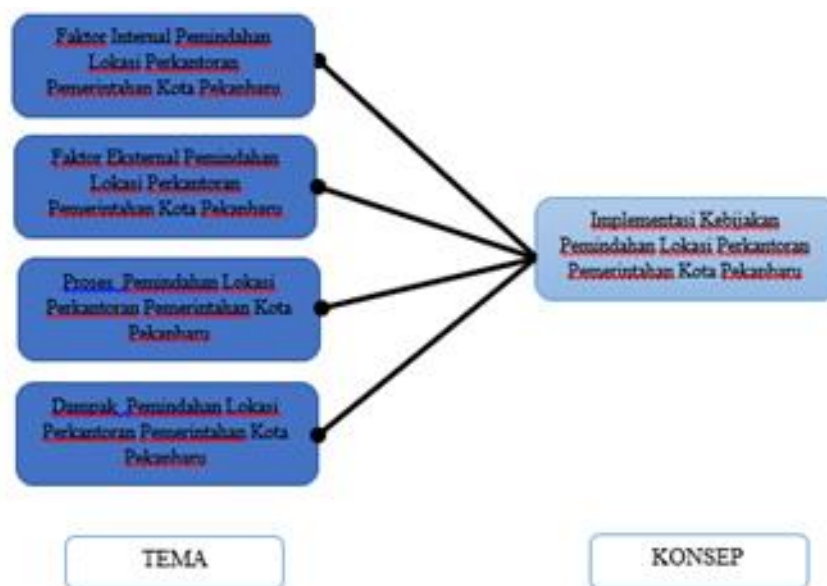
Keberadaan 4 (empat) tema tersebut membentuk 2 (konsep) dalam keterkaitannya dengan pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya. Dua konsep tersebut adalah implementasi kebijakan pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya, dan pembentukan kota baru.

Konsep implementasi kebijakan pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya direduksi dari tema-tema faktor internal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, faktor eksternal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, proses pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, dan dampak pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward (1984), implementasi dibentuk dari berbagai faktor-faktor yang menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan suatu kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Faktor-faktor tersebut sudah melebur dan menjadi bagian dari 4 (empat) tema yang telah tereduksi.

Tabel 4. Unit Informasi dan Tema Dampak Pemindahan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru

Unit Informasi	Tema
Kenaikan harga lahan	Dampak Pemindahan Lokasi Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru
Preferensi kepemilikan lahan	
Memicu terbentuknya kawasan baru penunjang perkembangan dan pertumbuhan kota	
Naiknya perekonomian masyarakat	
Tersedianya lapangan pekerjaan	
Adanya upaya untuk mengubah mindset masyarakat terhadap Tenayan Raya	
Adanya hambatan mobilitas bagi para pegawai	
Kondisi jalan yang belum maksimal karena terbatasnya anggaran	

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

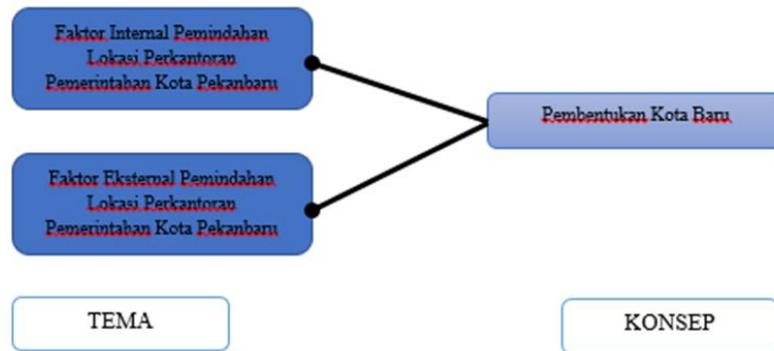


Gambar 2. Konseptualisasi Implementasi Kebijakan Pemindahan Lokasi Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

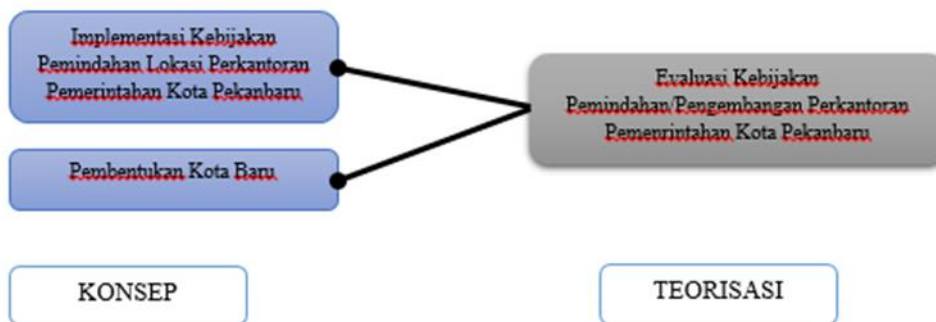
Konsep pembentukan kota baru direduksi dari tema-tema faktor internal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru dan faktor eksternal pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru. Aspek-aspek informasi pada tema faktor internal dan faktor eksternal tersebut menjadi bahan dasar dalam pembentukan kota baru. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Zahnd (2006), terdapat 3 cara perkembangan dasar di dalam kota

yaitu perkembangan secara horizontal, vertikal, dan interstisial. Pemindahan perkantoran pemerintahan ke Kecamatan Tenayan Raya yang terletak di posisi timur Kota Pekanbaru sebagai bentuk perluasan dan pengembangan perkantoran memiliki indikasi adanya perkembangan kota secara horizontal yaitu cenderung mengarah ke luar atau di pinggir kota. Perkembangan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya sebagai kota baru diberi nama Bandar Raya Tenayan dengan penggerak utamanya adalah perkantoran pemerintahan sedangkan pendorongnya antara lain adalah Kawasan Industri Tenayan (KIT), industri pariwisata, serta kawasan bisnis, perdagangan, dan jasa.



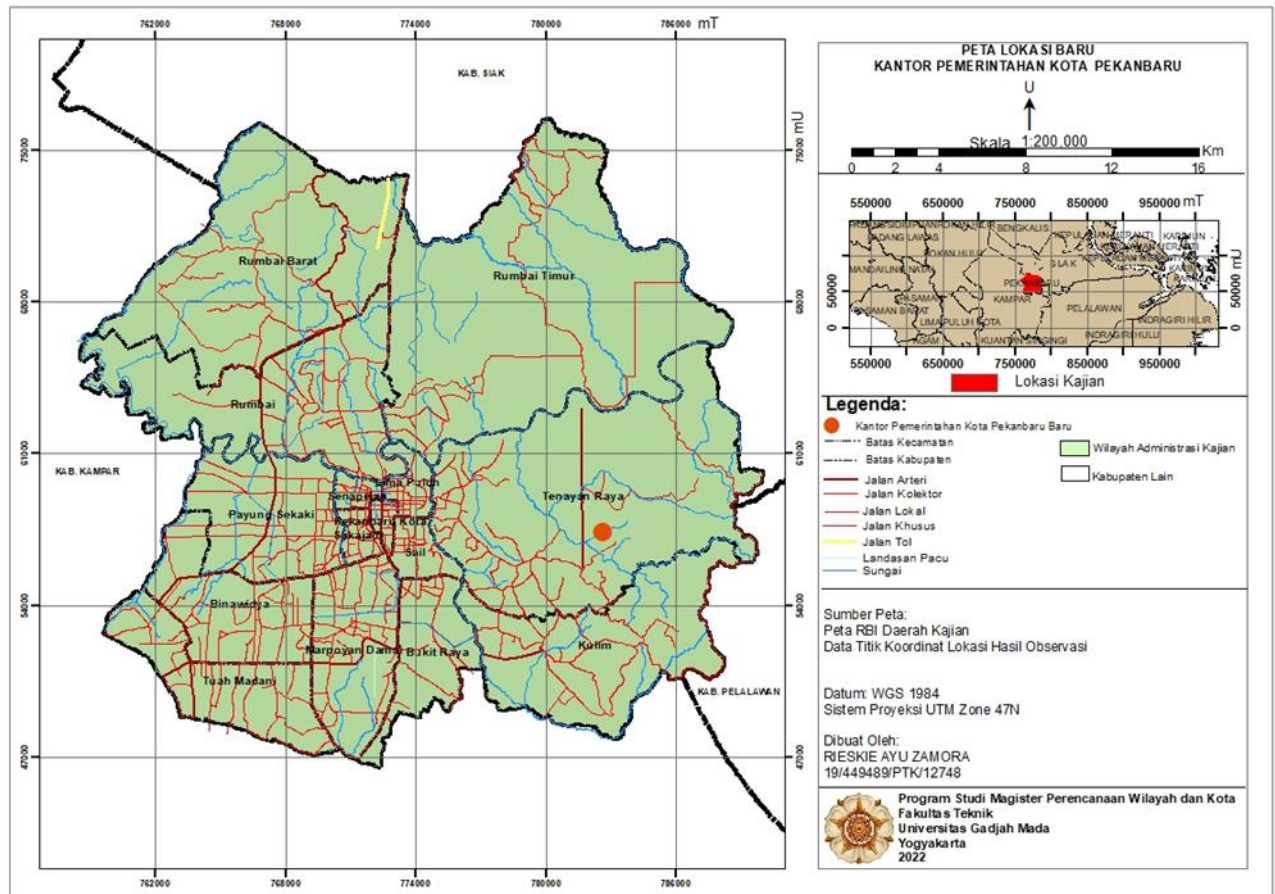
Gambar 3. Konseptualisasi Pembentukan Kota Baru
Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

Keberadaan konsep implementasi kebijakan pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru dan pembentukan kota baru merujuk pada evaluasi terhadap kebijakan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya yang menjadi batu loncatan untuk membentuk kota baru. Berdasarkan teori Dunn (2003) tentang evaluasi kebijakan yakni terkait dengan nilai dan manfaatnya, maka kebijakan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya telah berhasil dilakukan dengan berbagai pertimbangan, proses, dan kajian dampak yang terdapat selama implementasi kebijakan dan juga gagasan untuk membentuk kota baru yang bernama Bandar Raya Tenayan.



Gambar 4. Skema Pembentuk Evaluasi Kebijakan Pemindahan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru
Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

Dampak Pemindahan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya Terhadap Perkembangan Kota Pekanbaru
Rieskie Ayu Zamora, Bakti Setiawan



Gambar 5. Peta Lokasi Baru Kantor Pemerintahan Kota Pekanbaru
 Sumber: Hasil Analisis Penulis (2022)

KESIMPULAN

Kebijakan pemindahan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya telah berhasil dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari berbagai faktor internal, faktor eksternal, proses, dan kajian dampak yang terdapat selama implementasi kebijakan. Faktor internalnya antara lain adalah adanya nomenklatur penamaan pemindahan perkantoran sebagai bentuk perluasan ataupun pengembangan kantor yang lama, keberadaan posisi Tenayan Raya yang strategis serta memiliki lahan yang luas, kondisi lahan dan ruang kerja di gedung perkantoran lama yang sudah tidak memadai, belum optimalnya pengembangan wilayah di Kota Pekanbaru, serta adanya inisiasi magnet pertumbuhan dan pembangunan yang bersifat blok dan superblok untuk pemerataan pembangunan di Kota Pekanbaru. Faktor eksternalnya adalah adanya kerjasama antar wilayah yang disebut dengan nama Pekansikawan, serta adanya asosiasi dengan Kawasan Industri Tenayan (KIT). Proses-proses yang dilalui yaitu bermula dari adanya visi dan misi kepala daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, kemudian melakukan inventarisasi pedoman atau dokumen perencanaan, penentuan alokasi pendanaan pembangunan perkantoran, menjalin komunikasi dengan stakeholder yang terlibat, dimensi waktu, menentukan lokasi yang tepat, menyediakan sarana dan prasarana, serta mengalihfungsikan gedung perkantoran yang lama.

Dampak pemindahan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru adalah untuk membentuk kota baru bernama Bandar Raya Tenayan. Penggerak utama Bandar Raya Tenayan adalah perkantoran pemerintahan, sedangkan pendorongnya adalah Kawasan Industri Tenayan (KIT), industri pariwisata, dan kawasan bisnis, perdagangan, dan jasa.

REKOMENDASI

1. Bagi peneliti selanjutnya
Keberadaan perkantoran pemerintahan yang terletak berdekatan dengan Kawasan Industri Tenayan (KIT) mendorong untuk dilakukan kajian mendalam mengenai perkembangan KIT tersebut, keterkaitannya dengan perkantoran pemerintahan, serta dampak keberadaan KIT terhadap lingkungan.
2. Bagi perencana wilayah dan kota
Perencana wilayah dan kota perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menarik investor guna mempercepat pembangunan kota baru dari segi infrastruktur fisik maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Diningrat, Rendy Andriyan. 2014. "Ketergantungan Kota Baru Kota Harapan Indah terhadap Kota Jakarta dan Wilayah Sekitarnya". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 3, Desember 2014. Institut Teknologi Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan, Edisi Kedua (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Febrianty, Sri Devi, dkk. 2015. "Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah Kota Tidore". *Jurnal Spasial: Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 1, No. 1. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kumala, Thalita. 2018. "Condotel dengan Pendekatan *Green Architecture* di Tenayan, Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009: 1-8. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, Hal 1-12. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rukmana, Deden. 2010. "Pemindahan Ibukota Negara". *Buletin Tata Ruang Hal 36-39, Spetember-Oktober 2010*. The Indonesia Ministry of Public Works.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Sujarto, Djoko. 1993. "Perkembangan Kota Baru". *Journal of Regional and City Planning Vol. 4, No. 9*. Institut Teknologi Bandung.
- Zahnd, Markus. 2006. *Perancangan Kota Terpadu*. Yogyakarta; PT. Graha Ilmu.